



Rekapitulasi Penghitungan Suara

Saksi Tak Datang, Dilarang Protes

JOGJA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan memperhatikan protes dari saksi partai politik atau calon anggota DPD terhadap rekapitulasi suara. Namun, protes dari saksi yang tidak datang dalam proses rekapitulasi, tidak akan dilayani.

Hal tersebut dikemukakan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Yogya-

karta, di Pendopo Balaikota Timoho. Pembukaan Rapat Pleno dihadiri antara lain Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto, Kapoltabes Yogyakarta, Kombes Polisi Agus Sukamsa, serta jajaran Muspida Kota Yogyakarta lainnya.

Nasrullah mengutarakan, terdapat 32 Parpol peserta Pemilu di Jogja, namun saksi Parpol yang hadir dalam rekapitulasi, kemarin, hanya 21 orang. Sedangkan dari 12 orang calon anggo-

ta DPD dari Provinsi DIY, hanya 5 orang saksi yang hadir.

"Bagi saksi yang hari ini tidak datang, terus besok datang, akan kami pertimbangkan. Kalau tidak datang terus tiba-tiba protes, tidak akan kami layani," tegasnya.

Menurutnya, rekapitulasi tidak diurutkan sesuai daerah pemilihan (Dapil), melainkan kesiapan kecamatan.

>> KE HAL 10

Saksi Tak Datang, Dilarang Protes

Sambungan dari halaman 1

Dari 14 kecamatan di Jogja, sampai kemarin baru 5 kecamatan yang sudah selesai melakukan penghitungan dan hasilnya direkap KPU. Kelima kecamatan tersebut adalah Danurejan, Pakualaman, Mantrijeron, Ngampilan, dan Wirobrajan.

Dikatakan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sebenarnya dijadwalkan berakhir 15 April lalu, dengan catatan, apabila rekapitulasi belum selesai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyelesaikan. Tetapi terdapat surat edaran KPU pusat yang menyatakan penghitungan suara di kecamatan diperbolehkan sampai 17 April hari ini.

"Untuk penghitungan suara di kecamatan waktunya sangat terbatas. Untuk itu diberikan tambahan waktu penghitungan. Misalnya di Kecamatan Umbulharjo, setiap harinya bisa menghitung 1 kelurahan. Di Umbulharjo sendiri ada 7 kelurahan,

padahal waktu yang disediakan hanya lima hari mulai 10 April lalu. Sehingga ada kebijakan sampai 17 April," paparnya.

Sementara itu, dalam pembukaan rapat pleno, Herry menyampaikan penghargaan kepada peserta Pemilu yang telah menjaga situasi Jogja tetap kondusif. Pemilu merupakan bagian

proses demokrasi, tetapi demokrasi bukan tujuan akhir.

Dikatakan, demokrasi menjadi sarana bagi rakyat untuk bisa menyampaikan hak-haknya secara benar. Juga menjadi peluang untuk menuju cita-cita kemerdekaan, yakni negara yang maju, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. (fir)

urkan Kepada Yth.
 . Walikota Yogyakarta
 . Wakil Walikota Yogyakarta
 . Sekretaris Daerah
 . Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005